LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**

UNIT KERJA : **STAF AHLI**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ACHMAD FATHONI**
2. Jabatan : **STAF AHLI BUPATI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK**
3. NHK : **949712**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.149.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 835 m2/430 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 1.390.000.000
2. Tanah Seluas 1.546 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 235.000.000
3. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 102.000.000
4. Tanah Seluas 841 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, WARISAN Rp. 422.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **162.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
3. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
4. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **63.682.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **250.000.000**

F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.625.182.000
III.	HUTANG	Rp.	----
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.625.182.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.